BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dalam pasal 9 menyatakan adanyanya klasifikasi mengenai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan tersebut yaitu menyangkut

adanya urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah berdasarkan Pasal 11 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yaitu ururusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan pemerintah daerah dan hampir semua daerah menyelenggarakan urusan pariwisata di daerahnya. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut H. Kodhyat 1983, pengertian pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Pariwisata juga merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan di setiap daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Dilihat dari situs *www.disbudpar.bandung.go.id* kategori wisata di Kota Bandung dibagi menjadi empat kategori yaitu kawasan wisata, hiburan dan rekreasi, makanan dan minuman serta daya tarik wisata. Berikut adalah daftar wisata Kota Bandung:

Tabel 1.1

Kategori Wisata Kota Bandung

Kawasan wisata	Hiburan dan Rekreasi	Makanan dan Minuman	Daya Tarik Wisata
Studio Rosid	This Is Me	Gang Nikmat	Matoa
NU Art	Eco Bambu	Kopi Aroma	Rupa Rupi Handicraft Market
Batik Komar	Museum Pos Indonesia	Sei Sapi Marase	Museum Kota Bandung
C59	Centrum Million Balls	Sherlock Common Space	Museum Gedung Sate
Minen Leather		Smash and Shake	
Batik Hasan		Baker Street	
Happy Go Lucky		Tjarani Cafe	

Sumber : https://www.disbudpar.bandung.go.id/destinationmap/destination/16 diakses 12-04-2019, pukul 21:46

Berdasarkan dari penjelasan diatas peneliti tertarik kepada tempat wisata di Kota Bandung, karena keberadaan tempat wisata sangat penting dan memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk melestarikan, membina, sekaligus mengembangkan budaya masyarakat baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Peranan pemerintah dalam mengembangkan dan mengelolah pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Model pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata daerah yang diusulkan untuk diterapkan dalam pengembangan potensi wisata daerah di Kota Bandung mengacu pada kondisi aktual saat ini berupa potensi dan masalah wisata. Untuk mengembangkan wisata terdapat berbagai *stakeholders* yang terlibat (pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM, program-program, dana dan fasilitas. Berdasarkan keterlibatan *stakeholders* dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di Kota Bandung kedepannya. Sasaran

tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata sehingga diperlukan peran serta dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah dan seluruh sektor yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan. Keberhasilan pelaksanaan pengembangan daerah tujuan wisata sangat tergantung dan tidak terlepas dari peran semua elemen, tentunya dengan memperhatikan unsur program, anggaran dan proses yang ada.

Dilihat dari pendapat menurut Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Bandung Lina Aulina yang peneliti baca:

> REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengembangan pariwisata Kota Bandung memerlukan kolaborasi antarpihak. Namun, menurut Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Bandung Lina Aulina, pengembangan sektor ini masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal, kata dia, pariwisata merupakan industri yang cukup menjanjikan bagi Kota Bandung. Apalagi banyak potensi yang dimiliki mulai dari pariwisata yang disediakan alam hingga pariwisata buatan seperti fashion, kuliner, dan lainnya. “Sesuai harapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Industri pariwisata diharapkan menjadi *leading sector* bagi perekonomian Jabar. Namun sayangnya, Bandung dengan segala potensi yang dimiliki, pemasarannya masih belum optimal,” ujad Lina pada acara seminar dan Pelantikan IMA Chapter Bandung periode 2019-2021 di Hotel Aryaduta, Jalan Sumatera, Selasa (9/4).Lina mengatakan, belum optimalnya pemasaran pariwisata Bandung dapat dilihat dari kadar popularitas, terutama pada tataran internasional. Saat ini, belum banyak turis mancanegara yang menjadikan Bandung kota tujuan wisata, layaknya Bali. Padahal, kata dia, secara potensi, Bandung memiliki kelebihan sektor pariwisata dibanding daerah lain. Ada wisata kuliner, budaya, industri kreatif, belum lagi ada 16 industri kreatif yang bisa dijual. Sektor tersebut bisa menjadi lokomotif pariwisata Kota Bandung.Lina menyarankan, untuk memaksimalkan potensi pariwisata di Kota Bandung, perlu ada kolaborasi antar stakeholder. Untuk pemasaran misalnya, Pemkot Bandung bisa menggandeng IMA sebagai tenaga pemasaran. Intinya, untuk mendongkrak pariwisata Bandung, perlu ada kolaborasi. Masih ada potensi destinasi wisata yang perlu dioptimalkanm"Itu paralel dengan memanfaatkan beberapa potensi yang ada. Misalnya UKM dan mereka yang ahli dalam bidang jasa," katanya. Sumber:https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pppas0335/

pariwisata-di-kota-bandung-belum-optimal, diakses 11-04-2019, pukul 20:54

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung masih belum optimal dalam memenuhi kewajiban untuk berperan dalam pengelolaan sektor pariwisata Kota Bandung. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Sebagai regulator Pemerintah Daerah sudah melahirkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Sebagai Mediator pemerintah daerah kurang merespon apa yang menjadi keinginan dan keluhan dari masyarakat terkait peningkatan sarana dan prasrana. Keinginan masyarakat dilokasi objek wisata tersedianya tempat parkir yang memadai, tempat duduk yang teduh dan nyaman, tempat untuk beribadah, toilet yang bersih, dan tempat makan yang murah dan terjangkau. Keluhan dari masyarakat yang sering dikemukakan yaitu kurangnya kebersihan, keamanan yang kurang terjamin dan kemacetan lalulintas menuju objek wisata.

Kurang optimalnya peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan sektor pariwisata terlihat dari tidak stabilnya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung baik wisatawan Domestik maupun Mancanegara. Data jumlah wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bandung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
di Kota Bandung

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2011	225 585	6 487 239	6 712 824
2012	176 855	5 080 584	5 257 439
2013	176 432	5 388 292	5 564 724
2014	180 143	5 627 421	5 807 564
2015	183 932	5 877 162	6 061 094
2016	173 036	4 827 589	5 000 625

(Sumber:https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/120/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik-di-kota-bandung-2016.html11/04/2019 22.54)

Kunjungan wisatawan ke Kota Bandung Tahun 2012 menurun dibandingkan dengan tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan, namun di tahun 2016 terjadi penurunan kembali.

Penelitian sebelumnya yang serupa dengan yang peneliti lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2013), dengan judul "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada era Reformasi". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, pembahasan dan hasil pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang Pengaruh Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia

pada era Reformasi, maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan keuangan antara Pemerintah adalah Pusat dan Daerah dalam berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan baik UU Nomor 25 tahun 1999 maupun UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan di waktu sebelumnya. Hal ini terlihat dari Pemerintah Pusat menyerahkan beberapa sumber-sumber pajak dan retribusi yang dimiliki Pemerintah Pusat yang selanjutnya menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai konsekuensi dianutnya desentralisasi. Undang-undang perimbangan keuangan di era reformasi ini pun telah memasukkan perimbangan keuangan dalam masalah pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan perdesaan, pajak penghasilan dan masalah sumber daya alam yang terdapat di daerah-daerah yaitu pertambangan umum, minyak bumi dan gas, kehutanan, dan perikanan, sehingga potensi keuangan daerah menjadi bertambah dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Kurniati (2014) sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaan terletak pada fokus penelitian tersebut kepada hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan persamaannya terletak metode penelitian yang mengunakan metode Kualitatif . Sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian Kedua dilakukan Oleh Widaraningsih (2016), dengan judul “Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makasar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

dengan pendekatan kuantitatif, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedua variable pendapatan sektor pariwisata mampu berkontibusi untuk pertumbuhan ekonomi.

Penelitian kedua yang dilakukan Widaraningsih (2016) sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, perbedaan terletak pada metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teori yang digunakan adalah teori tentang pengaruh sedangkan peneliti menggunakan teori peranan, persamaannya terletak pada variable yang digunakan adalah pariwisata. Sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian Ketiga dilakukan Oleh Saidah (2017) dengan judul "Analisa Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, berdasarkan hasil dari penelitian tersebut Upaya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung dapat dikatakan tidak semua terlaksana dengan maksimal baik dari segi sarana dan prasarana, maupun obyek wisatanya karena saat ini belum ada obyek wisata yang dikelola secara mandiri oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung melainkan dikelola secara pribadi oleh masyarakat dan obyek wisata tersebut tidak ditarik retribusinya. Namun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tetap mengalami peningkatan karena didukung dari kontribusi sektor pariwisata berupa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Hotel, restoran, dan hiburan termasuk dalam jasa industri pariwisata yang merupakan

salah satu fokus pengembangan yang sedang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung

Penelitian ketiga yang dilakukan Saidah (2017) memiliki perbedaan terletak pada metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan teori yang digunakan adalah teori tentang analisa strategi sedangkan peneliti menggunakan teori peranan, persamaannya terletak pada variable yang digunakan adalah pariwisata. Sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung, sehingga peneliti mengambil judul **"Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung dilihat dari Kebijakan, Strategi dan Komunikasi

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih dalam mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelolaan Sektor Pariwisata Kota Bandung. Sedangkan Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam mengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Strategi pemerintah daerah dalam mengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata dan memberikan tambahan ilmu pada bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang peranan pemerintah daerah dan mencari solusi apabila peranan pemerintah tersebut menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.

   b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk menambah informasi atau menjadi referensi tidak langsung untuk

masyarakat serta dapat memberikan dalam bentuk sebuah saran kepada pemerintah daerah terkait dengan pariwisata Kota Bandung.

c. Bagi Lembaga diharapkan dapat bermanfaat khususnya pada peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor Pariwisata agar lebih maksimal dan tepat pada sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi lembaga terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung khususnya tentang pariwisata serta menjadi referensi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah lainnya.